

Proyek di Atas Rp 200 Juta Tetap Lelang

BATAM, TRIBUN - Proyek semenisasi jalan yang menggunakan APBD dengan nilai proyek di atas Rp 200 juta tetap harus dilelang. Sedangkan dibawah Rp 200 juta akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL). Hal ini disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

"Saya belum mendalami informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Biarlah itu menjadi ranahnya ULP (Unit Layanan Pengada-

an). Kita tak usah masuk ke wilayah itu. Yang saya tahu bahwa nilai proyek dibawah Rp 200 juta masuk PL tetapi tetap harus ada 3 yang bersaing," ujar Amsakar, Selasa (20/3).

Amsakar menambahkan amanah dari Undang-Undang (UU) tentang pengadaan barang dan jasa ini bagaimana agar harganya kompetitif. Ditambah pula dengan pelaku usaha yang memang berkompeten untuk

melaksanakan itu.

"Itu hakekat lelang dan harus dipelajari benar-benar. Bagaimana persyaratannya, bagaimana kompetensi dari badan usaha yang ikut, apa pengalaman yang sudah dilakukan. Itu sebenarnya," paparnya.

Intinya, kata dia, sampai dengan Rp 200 juta masih bisa di PL itupun diuji mana yang paling layak diantara ketiganya. Kecuali yang e-katalog tinggal beli. (rus)

Disdukcapil Dapat 30 Ribu Keping KTP

▶ Didistribusikan untuk Empat Kecamatan

BATAM, TRIBUN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, kembali menerima tambahan blangko KTP-el sebanyak 30 ribu keping dari pusat.

"Setelah menerima blangko KTP-el sebanyak 16 ribu dari pusat, terbaru kami kembali menerima 30 ribu keping blangko KTP-el. Dan itu kita rencanakan diperuntuhkan untuk empat kecamatan yang sama sekali belum selesai," kata Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar, Selasa (20/3).

Dia melanjutkan, empat kecamatan yang saat ini tinggal menyelesaikan pencetakan KTP-el yakni Kecamatan Sekupang, Batuampar, Bengkong, dan Lubukbaja. "Semua kecamatan ini kita targetkan selesai bulan Mei, semoga dapat terkejar sesuai dengan target yang diberikan pak wali," jelasnya.

Dia juga menyampaikan, hingga saat ini pihaknya sudah menyelesaikan tujuh kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam, seperti di wilayah hinterland yaitu Kecamatan Belakangpadang, Galang dan Bulang.

Sedangkan di wilayah mainland yaitu Kecamatan Batuaji, Seibeduk, Nongsa dan Batam Kota, sementara kecamatan Sagulung masih tahap penyelesaian.

"Delapan kecamatan sudah kita alokasi seluruh blangko yang diterima beberapa waktu yang lalu untuk penyelesaian pencetakan. Namun saat ini dari delapan kecamatan yang kita alokasi-



Setelah menerima blangko KTP-el sebanyak 16 ribu dari pusat, terbaru kami kembali menerima 30 ribu keping blangko KTP-el. Dan itu kita rencanakan diperuntuhkan untuk empat kecamatan yang sama sekali belum selesai

SAID KHAIDAR

Kepala Disdukcapil Batam

kan itu, Kecamatan Sagulung masih tahap proses penyelesaian,"ujarnya.

Dia menambahkan, di tengah proses pencetakan blangko KTP-el yang diterima sebanyak 30 ribu dilakukan pencetakan terhadap beberapa kecamatan yang belum selesai. Pihaknya juga sudah mengajukan penambahan ke pusat.

"Hal ini kita lakukan, agar ketika blangko KTP-el yang kita terima sebanyak 30 ribu sudah selesai dan masih kurang, kita su-

dah mendapatkan kembali penambahan dari pusat. Sehingga target kita untuk menyelesaikan pencetakan di tiap kecamatan pada Mei dapat tercapai,"terangnya.

Dia juga berharap kepada masyarakat yang mengurus permohonan pencetakan KTP-el di kecamatan, khususnya di tiap kecamatan yang sudah selesai dilakukan pencetakan, agar segera menanyakan dan mengambil ke kantor kecamatannya apakah KTP-elnya sudah selesai atau tidak.

"Hal ini kita minta agar KTP-el yang sudah selesai dicetak tidak menumpuk di kantor kecamatan,"katanya. **12.486 Permohonan KTP di Bengkong** Sementara Kecamatan Bengkong hingga kini masih ada 12.486 permohonan pencetakan. Terhitung mulai 16 Januari sampai 28 Februari 2018.

Hal tersebut disampaikan Camat Bengkong, M. Tahir terkait permohonan KTP yang masuk dari tahun 2016 hingga 15 Januari 2017 berjumlah 404 KTP. "Itu pun sisa yang masih belum diambil oleh warga," katanya, Selasa (20/3).

Kapan selesai pencetakan, pihaknya masih menunggu dari Disdukcapil Kota Batam. "Pencetakan ranahnya di Disduk, kita hanya mengajukan," ujarnya.

Warga yang memerlukan identitas untuk mencari kerja dan keperluan yang menyaratkan adanya KTP el masih menggunakan Surat Keterangan (Suket). "Suket perharinya kisaran 40 - 60 surat yang kita keluarkan," pungkasnya.(dra/als)

Dua Tahun tak Bayar Pajak

► Anggaran Kendaraan Dinas tak Ada



BATAM, TRIBUN - Kewajiban membayar pajak bukan hanya dibebankan kepada masyarakat biasa saja. Melainkan seluruh instansi pemerintahan baik swasta maupun negeri.

Namun untuk dua tahun terakhir, Kota Batam tidak ada penganggaran membayar pajak kendaraan. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho.

"Perhitungannya termasuklah untuk tahun ini tak

membayar pajak," ujarnya di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (19/3).

Ia menambahkan bahkan untuk mobil dinas dewan saja, kata dia, selama 4 tahun dirinya menggunakan, tidak pernah sekalipun membayar pajak kendaraan. Padahal tak dibayarnya pajak kendaraan ini, akan berimbas kepada aser kendaraan.

"Ya jelas sajalah berdampak kepada nilai aset akan turun karena ada penyusutan administrasi kelengkapan

kendaraan. Sementara pajak inilah yang sebenarnya mengangkat nilai objek pajak itu," tegasnya.

Ia menyesalkan selama ini hanya terarah pada pembelian saja. Sementara perawatan, pemeliharaan, pajak dan lainnya tak di pikirkan.

Contohnya bukan hanya mobil dewan saja, truk-truk pengangkut sampah di Dinas Kebersihan juga mendapat perlakuan yang sama. Semua pada mati bahkan KIR juga tak ada. (rus)

Ya jelas sajalah berdampak kepada nilai aset akan turun karena ada penyusutan administrasi kelengkapan kendaraan

UDIN P SIHALOHO

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam

Gubernur Kembalikan UMS ke Pemko

► Minta Dilengkapi Berita Acara Kesepakatan

BATAM, TRIBUN -Penyampaian Upah Minimum Sektor (UMS) yang telah diserahkan Pemerintah Kota (Pemko) kepada Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dikembalikan lagi ke Pemko. Gubernur meminta untuk melengkapi berita acara atau kesepakatan tersebut, harus sesuai dengan mekanisme atau regulasi.

"Pelaku usaha di berita acara tersebut belum menandatangani surat kesepakatan itu. Terutama untuk bagian elektronik. Ada penyesuaian plus minus satu persen. Inilah yang mekanismenya perlu diluruskan kembali," ujar Wakil Wali Kota, Amsakar Achmad di Kantor DPRD Kota Batam, Selasa (20/3).

Amsakar mengakui penolakan dari Gubernur, padahal Pemko prinsipnya ketidaksiapaanpun menjadi sebuah hasil kesimpulan. Karena berpegang pada prinsip tersebut, Pemko meneruskan kepada Gubernur.

"Saya akan sampaikan



Pelaku usaha di berita acara tersebut belum menandatangani surat kesepakatan itu. Terutama untuk bagian elektronik

AMSAKAR ACHMAD

Wakil Wali Kota

kepada Kepala Dinas seperti apa mekanisme yang diamankan oleh Undang - undang. Kalau seandainya yang kemarin itu tetap juga dilakukan, barang kali sampai ke peradilan tata usahapun akan ada sejumlah mekanisme lain yang diberi ruang oleh aturan," katanya.

Intinya yang diusulkan oleh

Pemko Batam atas hasil rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) diteruskan kepada Gubernur, dan Gubernur mengembalikan itu, karena ada angka-angka yang masih harus mendapat penandatanganan semua stakeholder terkait.

"Terutama bipartit. Badan usaha dengan pekerja plus tripartitnya pemerintah daerah. Nah ini ada satu yang tak disepakati UMS untuk sektor elektronik," katanya.

Terkait berita acara yang dikembalikan oleh Gubernur Nurdin Basirun kepada Pemko Batam, belum sampai ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, menyebut belum menerima hasil berita acara yang sudah disampaikan Pak Wali, kepada Gubernur Kepri mengenai pengembalian berita acara itu.

Ia menyebut belum mengetahui persis apa masalahnya dan solusi yang akan dilakukan terhadap hasil penolakan berita acara, dari hasil rapat

yang berlangsung dengan melakukan voting dalam penetapan UMSK yang sudah digelar beberapa hari yang lalu.

"Sampai saat ini berita acara yang dikembalikan Gubernur Kepri belum saya terima dari Pemko apa hasilnya. Saya belum tahu persis apa kendalanya, sehingga belum tau apa yang mau saya sampaikan untuk solusi mengenai dikembalikannya hasil voting berita acara yang diserahkan Pemko Batam kepada Pak Gubernur," terangnya.

Dia juga menyampaikan, apabila nanti Pemko Batam sudah menyerahkan hasil yang dikembalikan Gubernur Kepri apa masalah dan kendalanya, Disnaker Kota Batam akan mencari solusi mengenai kendala tersebut.

"Jika kita sudah terima hasilnya dari Pemko Batam, nanti akan kita sampaikan apa solusinya dan apa kendalanya. Tapi saat ini saya belum terima dan belum mengetahui apa kendalanya," katanya. (als)